

Judul : Meringankan beban energi tanpa membebani rakyat  
Tanggal : Senin, 18 April 2022  
Surat Kabar : Media Indonesia  
Halaman : A1



**ANTRÉ PERTALITE:** Warga menunggu giliran untuk mendapatkan pertalite di SPBU Pou Bongo, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (6/4). Rencana penarikan harga energi seperti bahan bakar minyak (BBM) pertalite dan solar, elpiji 3 kilogram (kg), serta tarif listrik dinilai dapat memberikan dampak berganda terhadap masyarakat.

Seharusnya di tengah tren kenaikan harga pangan saat ini, harga energi seperti pertalite hingga tarif listrik tidak perlu ikut melambung.

INSI NANTIKA JULITA  
insi@mediaindonesia.com

**R**ENCANA penarikan harga energi seperti bahan bakar minyak (BBM) pertalite dan solar, elpiji 3 kilogram (kg), serta tarif listrik dinilai dapat memberikan dampak berganda terhadap masyarakat. Rencana penarikan harga keempat komoditas itu diyakini akan menyulitkan kenaikan inflasi yang dapat membuat harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi.

"Sekarang saja harga kebutuhan pokok sudah naik. Kenaikan harga energi itu bisa memberikan beban lagi ke masyarakat, khususnya kelas menengah bawah," ujar pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi, Jumat (15/4).

Sinyal penarikan harga BBM jenis pertalite (RON 90) dan solar itu diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Rabu (13/4). Arifin beralasan langkah itu harus dilakukan sebagai dampak melonjaknya harga minyak mentah dunia.

"Dalam jangka menengah dan panjang kita akan melakukan optimalisasi campuran bahan bakar nabati dalam solar, penyesuaian harga pertalite, minyak solar, dan mempercepat bahan bakar pengganti lainnya," kata dia.

Memang melonjaknya harga minyak dunia hingga melampaui US\$100 per barel akibat konflik Rusia-Ukraina memukul perusahaan energi dunia, tak terkecuali PT Pertamina (persero) dan PT PLN (persero).

Kendati begitu, kata Fahmy, untuk meringankan beban APBN akibat kenaikan harga minyak dunia tersebut, masih ada upaya lain yang dapat dilakukan tanpa menaikkan harga BBM, elpiji 3 kg, dan tarif listrik. Salah satunya merelokasi dana *windfall* dari meningkatnya harga batu bara dan dana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang diberlakukan pada 1 April 2022.

"Hal itu bisa dilakukan atau bisa juga memberikan dana kompensasi ke Pertamina atau PLN. Pasalnya, empat komoditas itu dikonsumsi

masyarakat luas dan wacana penarikan harga hanya menambah beban rakyat miskin semakin berat," ucapnya.

Pengamat ekonomi energi dari UGM itu mendorong agar wacana penarikan harga energi tidak dilakukan dalam waktu dekat mengingat sudah banyak protes yang dilontarkan masyarakat akibat tingginya harga pangan saat Ramadan dan bisa mencederai tuntutan mahasiswa soal penurunan harga BBM pada unjuk rasa 11 April lalu.

"Tahun ini sebaiknya jangan dulu dinaikkan harga energi itu karena dampak pandemi masih terjadi dan bisa menurunkan daya beli masyarakat," tuturnya.

Penolakan terhadap rencana penarikan bahan bakar minyak (BBM) pertalite dan solar, elpiji 3 kilogram (kg), serta tarif listrik juga diungkap-

kan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah. Dia berpendapat, seharusnya di tengah tren kenaikan harga pangan saat ini, harga energi seperti pertalite hingga tarif listrik tidak perlu ikut melambung.

"Supaya tidak memicu lonjakan inflasi yang tidak terkendali dan pada ujungnya bisa memicu kegaduhan sosial dan politik," kata dia kepada wartawan.

Menurutnya, laju inflasi tahun ini diprediksi bisa liar alias di atas target pemerintah 4% year on year (yoy). "Kalau tidak dinaikkan, harga energi itu bisa menahan tingkat inflasi yang sedang merangkak naik dan menahan agar tidak liar," tambahnya.

Di satu sisi, Piter menyebut penahanan harga BBM, gas, dan listrik akan menambah beban Pertamina dan PLN. Namun, apabila diiringi dengan penambahan subsidi ke perusahaan negara itu, beban kedua perseroan bisa berkurang.

Selain itu, penarikan harga komoditas saat ini dan penarikan pajak akan meningkatkan penerimaan pe-

merintah. Surplus penerimaan bisa digunakan untuk membiayai kenaikan beban subsidi, baik untuk BBM, gas, maupun listrik," tegasnya.

**Jaga ketersediaan**

Menteri ESDM menegaskan pihaknya juga akan melakukan pengurangan BBM dengan menjaga operasional kebutuhan nasional menjadi 30 hari dari sebelumnya 21 hari, manajemen stok jangka panjang, serta optimalisasi campuran bahan bakar nabati dalam solar.

Tak hanya itu, pemerintah bakal menambah kuota BBM subsidi seperti solar, minyak tanah, hingga BBM khusus penggunaan seperti pertalite. Kuota pertalite diusulkan bertambah 5,45 juta kiloliter (kl) menjadi 28,50 juta kl, solar subsidi diusulkan naik sebesar 2,29 kl menjadi 17,39 juta kl, dan minyak tanah bertambah 0,10 juta kl menjadi 0,58 juta kl.

Di depan legislator, Arifin juga menyampaikan langkah lain untuk menjaga ketersediaan kebutuhan elpiji ialah dalam jangka pendek akan meningkatkan pengawasan

pendistribusian elpiji 3 kg tepat sasaran, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, uji coba penjualan dengan aplikasi *My Pertamina* di 34 kabupaten/kota pada 2022 dan penyesuaian formula elpiji 3 kg.

Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah akan melakukan substitusi dengan kompor induksi, subsidi komoditas menjadi subsidi langsung ke pengguna, dan substitusi dengan *dimethyl ether* atau DME untuk jangka panjang untuk mengurangi 1 juta metrik ton elpiji di 2027. "Penyesuaian harga jual eceran (elpiji) untuk mengurangi tekanan APBN dan menjaga inflasi serta percepatan program biogas," urainya, menambahkan.

Kemudian, penyesuaian atau pengurangan penggunaan BBM dan tekanan APBN di sektor ketenagalistrikan, dalam jangka pendek pemerintah juga rencana menyesuaikan tarif listrik atau *tariff adjustment* 2022. "Ini bisa dilakukan penghematan kompensasi Rp7 triliun-Rp16 triliun," kata Menteri ESDM. (E-3)



**TARIF LISTRIK:** Warga memasukkan pulsa token listrik di salah satu rumah indeks di kawasan Sunter Jaya, Jakarta.